

DAFTAR PUSTAKA

Literatur dan Jurnal

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). 2015. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran (IHSP) Tahun 2015*.
- Denis Dimas Permana dan Emil Bachtiar. 2013. *Analisis Peranan Inspektorat Kabupaten Sebagai Auditor Intern Pemerintah Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kabupaten Wonosobo)*.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2013. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 01 revisi 2013 tentang Penyajian Laporan Keuangan*.
- Inspektorat Kota Padang. *Laporan Hasil Reviu (LHR) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang Tahun 2015*.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). 2005. *Kerangka Konseptual Laporan Keuangan Pemerintah*.
- Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). 2007. *PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan*.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik. Cetakan Keempat Edisi Pertama*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mayadiana Sugondo. 2014. *Peran Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Periode 2009-2013*.
- Sayuti Hasibuan. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Pendekatan Nonsekuler*. Surakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah Press bekerja sama dengan Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Sentot Rahmat. 2010. *Analisis Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawasan Intern Kementerian Lembaga Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Studi Pada Kementerian Keuangan)*.
- Sofyan Siregar. 2013. *Metode Penelitian*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group.

Peraturan dan Perundang-undangan

- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Kementerian Negara/Lembaga.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP).*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*

Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor: PER-1663/KJF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang.*

Republik Indonesia. *Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.*

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.*

